

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, 2009.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta, 2012.

Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, RajaGrafindo, Jakarta, 1995.

Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar KodifikasHukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Pidana*, Bandung, 1992.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Edy Damian, *The Rule Of Law dan Praktek-Praktek Penahanan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1968.

Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.

Harum .M.Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995.

Hermin Kadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang, dalam Jan Michiel Otto (et.all), Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar Bali, 2012.

Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Karden Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2009.

Kementerian Kehutanan. *Potret Hutan Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak* : BPKH Wilayah III Pontianak, 2011.

Koesnadi hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.

Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005.

Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015.

Marcus Colchester dan Sophie Chao, ed, *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*, Epistema Institute, Jakarta, 2012.

Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974.

Mas Achmad Santosa dkk, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup*, dalam (Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Permasalahannya), Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998.

Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009.

Mohammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamatra, 2010.

Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Persepektif Global dan Nasional*, Rajawali, Jakarta, 2014.

Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2015.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998.

Mulyanto. *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.

-----, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Myrna A. Safitri (Ed), *Untuk Apa Pluralisme Hukum ?: Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia* (Jakarta: Epistema Institut, Jakarta, 2011).

Nurdjana, Teguh, Sukardi, Sukardi, *Korupsi & Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Otje Salman Soemadinigrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Pius A. P, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994.

P. Soemetro dan Teguh Prastyo, *Sari Hukum Pidana*, Mitra Prasaja Ofset, Yogyakarta, 2002.

Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang, 2005.

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

-----, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Graficv ka, Jakarta, 2007.

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014.

Salim H.S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.

-----, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, 2000.

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004.

-----, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem- Peteheam, Jakarta, 1996.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Ke dua, Yogyakarta, 1999.

Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Kasus Papua, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005.

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2007.

-----, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

-----, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tim Badan Litbang Kehutanan Dan Taman Nasional Merubetiri. *Reviewtentang Illegal Logging sebagai Ancaman terhadap Sumberdaya Hutan dan Implementasi Kegiatan Tongat*, Dasar-dasar Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2009.

Tongat, *Dasar-dasar Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.

Tri Andrisman, *Delik-delik luar KUHP, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2005.

-----, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009.

Untung Iskandar dan Agung Nugraha, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak*, Debut Press, Yogyakarta, 2004.

Wiryono Projodikoro, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Peraturan perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
5. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan
7. Undang-Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
8. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Aceh.
9. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Mengatur Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
10. Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar pada Tahun 2008.

C. Lainnya

Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Kesenjangan Persediaan Kayu Legal dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kapasitas Industri Kehutanan di Indonesia: Sebuah Kajian Peta Jalan Revitalisasi Industri Kehutanan, Fase 1* 2015. <https://www.eyesontheforest.or.id/uploads/default/news/attachment/14940420640KAMH-FT-17-Feb-2015-Kesenjangan-Persediaan-Kayu-Legal-dan-Implikasinya-terhadap-Peningkatan-Kapasitas-Industri-Kehutanan-di-Indonesia.pdf>, diunduh pada Selasa 8 September 2020, pukul 16:30 Wib.

Badan Pusat Statistik. *Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Berdasarkan SK Menteri Kehutanan*, <https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-menurut-provinsi-berdasarkan-sk-menteri-kehutanan.html>, diunduh pada Selasa 8 September 2020, pukul 16:30 Wib.

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs <https://ditjenbun.pertanian.go.id> dan <https://jdihn.bphn.go.id/> pada tanggal 6 Februari 2020 Pukul 10.48 Wib. diunduh pada Kamis 9 April 2020, pukul 20.00 Wib.

Deasy Soekromo, 2016, Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 21, No. 5.

Elli Rusliana, 2012, Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 61.

Fransiska Novita Eleanora, 2012, Tindak Pidana *illegal logging*, *ADIL, Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.2.

Fransiska Novita Eleanora, 2012, Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut UU No 32 Tahun 2009, *Adil*, Vol. 3, No. 2.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d80638fa9140/pencurian-ringan-hasil-perkebunan-secara-berulang/#:~:text=Pasal%20362%20KUHP,paling%20banyak%20sembilan%20ratus%20rupiah>, diunduh pada Minggu 26 Juli 2020, pukul 13.00 Wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan/> diunduh pada Minggu 26 Juli 2020, pukul 13.30 Wib.

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1190> diunduh Pada Minggu 26 Juli 2020, pukul 13.30 Wib.

<https://eia-international.org/wp-content/uploads/The-Loss-of-Our-Forest-and-Peatland-IND.pdf>, diunduh pada Kamis 9 April 2020, pukul 19.00 Wib.

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.pdf>, di akses pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 21:00 WIB.

<https://www.wwf.id/>, diunduh pada Selasa 8 September 2020, pukul 16: 30 Wib.

Mukti Adji, 2007, Tinjauan Hukum Illegal Logging.

<http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html>, diunduh pada Kamis 30 Juli 2020, pukul 13:00 WIB.

Pasal 37 ayat 2 RUU KUHP, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, <http://www.djpp.kemenkumham.go.id/>, diunduh pada Senin 5 Oktober 2020.

Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (Redd+) Di Indonesi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Bogor, 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 pada tahun 2007 dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang juga melarang pejabat pemerintah kabupaten mengeluarkan IUPHHK dari hutan produksi walau tetap mengizinkan bupati atau walikota mengeluarkan IUPK kepada perseorangan dan koperasi yang ingin memanfaatkan kayu bagi keperluan pribadi. Kayu yang diambil dengan izin itu tidak boleh diperdagangkan secara komersial.

Sali, Kamus Indonesia Inggris, 1987 Jurnal Hutan dan Masyarakat, Modern English Press, Jakarta, Vol. 10, No. 2.

Syafaruddin, *Kekuatan Sistem Hukum Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging*, <http://jurnal.uma.ac.id/sites/default/files/materi/JURNAL%20MORAL.pdf>, diunduh pada Senin 5 Oktober 2020.

WWF Kehutanan Indonesia

https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/, diunduh pada Selasa 8 September 2020, pukul 16: 30 Wib.